

## **ABSTRAK**

**Nama : Yustamar Koco Hatmanto**

**Program Studi : Administrasi Negara Bidang Minat/ Konsentrasi Manajemen  
Kepegawaian pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Pendidikan Ilmu Kepegawaian**

**Judul : Analisis Fasilitas Pegawai Negeri Sipil untuk Rumah Negara**

**di Lingkungan Kementerian Keuangan**

**Salah satu fasilitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni Rumah Negara hingga saat ini masih terdapat beberapa permasalahan seperti dihuni oleh yang tidak berhak. Sedangkan yang berhak menghuni Rumah Negara adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap Rumah Negara hanya dapat dihuni selama memegang jabatan tertentu untuk Rumah Negara golongan I dan hingga pensiun dan wajib dikembalikan pada negara untuk Rumah Negara golongan II. Jika tetap menempati Rumah Negara maka akan melanggar dari ketentuan pemerintah. Semua pelanggaran pada penghunian Rumah Negara dapat diberikan sanksi berupa pencabutan surat izin penghunian. Pada prakteknya di lapangan, tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah biasanya hanya mengeluarkan surat peringatan bahwa penghuni Rumah negara sudah tidak berhak lagi untuk menghuni Rumah Negara tersebut dan memerintahkan agar mengosongkan rumah. Namun di lapangan banyak yang tidak mengindahkan surat peringatan tersebut sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan Rumah Negara**

yang seharusnya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini.

**Kata kunci: Fasilitas, Pegawai Negeri Sipil, Rumah Negara, Sanksi**

7

## **ABSTRACT**

**Name : Yustamar Koco Hatmanto**

**Study Program : Administrasi Negara Bidang Minat/ Konsentrasi Manajemen**

**Kepegawaian pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Pendidikan Ilmu Kepegawaian**

**Title : Analisis Fasilitas Aparatur Sipil Negara untuk Rumah Negara**

**di Lingkungan Kementerian Keuangan**

**One of the facilities of civil servants (PNS) that is the state house until now there are still some problems such as inhabited by the unentitled. While the right to inhabit the House of State is the official or civil servants (PNS). Each house of state can only be settled while holding a specific position for the House of State group I and until it is retired and must be returned to the country for the state II House. If still occupying the country house then it will violate the government provisions. All violations in home country residential can be given sanctions in the form of revocation of residential permits. In practice in the field, actions undertaken by the Government usually only issue a warning letter that the residents of the home country are no longer entitled to inhabit the house of the country and instruct to vacate the house. But in the field many do not heed the warning letter so as to not optimize the management of the State House that**

**should be allocated for civil servants (PNS) at present.**

**Keywords: facilities, civil servants, state homes, sanctions**